



# LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2017



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BOGOR

2018

<https://bogorkota.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kota Bogor ini dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Clean Governance*.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kota Bogor ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai:

1. Penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah di bidang statistik dan fungsinya dalam menyelenggarakan statistik dasar
2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta
3. Mengembangkan dan membina statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disamping itu juga laporan akuntabilitas kinerja ini sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2017 dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Bogor yang merupakan Perwakilan BPS di daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai dengan penerbitan laporan kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Bogor, 20 Februari 2018

Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Kepala,

Ir. Bambang Ananto Cahyono, M.Si

NIP: 19650317 198702 1 001

## DAFTAR ISI

	hal
<b>Kata Pengantar</b>	ii
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS/Unit Kerja/Satker Daerah	2
1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kota Bogor Tahun 2017	3
1.5 Potensi dan Permasalahan	
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	4
	5
	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>
BAB II      2.1 Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019	10
2.2 Perjanjian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2017	10
	20
	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
BAB III      3.1 Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2017	26
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2015 – 2017	27 30
3.3 Capaian Kinerja BPS Kota Bogor terhadap Target Renstra 2015 dan 2019	31
3.4 Prestasi Tahun 2017	
3.5 Kegiatan Prioritas BPS Kota Bogor Tahun 2017	32
3.6 Upaya Efisiensi di BPS Kota Bogor	32
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2017	33
	33

BAB IV	<b>PENUTUP</b>	35
	4.1 Tinjauan Umum	35
	4.2 Tindak Lanjut	36

<https://bogorkota.bps.go.id>

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kota Bogor adalah *Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua*. Pengejawantahan visi BPS Kota Bogor tersebut dilakukan dengan melaksanakan Pembangunan Perstatistikan.

Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik:

- a. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.
- c. Peningkatan kapasitas SDM dan Penataan kelembagaan.
- d. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja
- e. Meningkatnya kerjasama antar lembaga/dinas/ instansi daerah atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas

Sasaran strategis BPS Kota Bogor yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya data dan informasi statistik Sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktuserta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik dengan target tingkat capaian 100 persen.
- b. Tersedianya data dan informasi Statistik Produksi yang lengkap, akurat, dan tepat waktudengan target tingkat capaian 100 persen.
- c. Tersedianya data dan informasi Statistik Distribusi yang lengkap, akurat, dan tepat waktudengan target tingkat capaian 100 persen.
- d. Tersedianya data dan informasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktudengan target tingkat capaian 100 persen.
- e. Meningkatnya hubungan dengan pengguna data dengan target tingkat capaian 100 persen.

- f Meningkatkan efektifitas dan Efisiensi Diseminasi dan Informasi Statistik dengan target tingkat capaian 100 persen.
- g Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metode statistik dan teknologi informasi mutakhir dengan target tingkat capaian 100 persen.
- h Melaksanakan tugas dan fungsi organisasi BPS Kota Bogor secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Kota Bogor dengan target tingkat capaian 100 persen.
- i Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Kota Bogor dengan target tingkat capaian 100 persen.
- j Meningkatkan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik dengan target tingkat capaian 100 persen.
- k Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik dengan target tingkat capaian 100 persen.
- l Meningkatkan kerjasama BPS dengan instansi lain dengan target tingkat capaian 100 persen.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2017 BPS menetapkan tiga program utama terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
3. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2017, dengan Nilai sebesar : Rp 5.957.407.000,- dan realisasi penggunaan mencapai Rp 5.286.244.288,-, atau mencapai 88,73 persen.

Kendala yang dihadapi didalam melaksanakan program-program BPS di tahun 2017 tersebut diantaranya adalah :

- a. Manajemen waktu yang kurang dari petugas lapangan untuk dapat menyelesaikan tugasnya yang beragam dengan baik dan tepat waktu, mengingat data yang diperoleh harus cepat untuk segera disajikan agar informasi yang disampaikan selalu *up to date* .

- b. Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS relatif masih rendah khususnya dari kalangan dunia usaha.

Dalam kegiatan pengumpulan data dengan sasaran responden perusahaan terkendala dengan tanggapan dari perusahaan yang kurang responsive yaitu keengganan untuk memberikan keterangan atau data yang sebenarnya. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu bahwa tidak seluruh perusahaan memiliki system administrasi yang memadai sehingga sulit untuk memberikan data. Selain itu ada juga perusahaan yang tidak ingin data-data perusahaannya diketahui karena alasan bisnis atau kekhawatiran bahwa pendataan yang dilakukan ada kaitannya dengan perpajakan. Atau ada juga perusahaan yang merupakan cabang dari daerah lain sehingga pemberian data harus melalui izin dari kantor pusatnya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan kreatifitas dan keuletan dari petugas pencacah dan hal inilah yang selalu disampaikan oleh kepala seksi di BPS Kabupaten kepada petugas pencacah disamping memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ditemui di lapangan.

- c. Seiring dengan adanya otonomi daerah maka tuntutan dari pengguna data BPS semakin menginginkan cakupan sampel meliputi wilayah terkecil (*small area statistics*).
- d. Dalam pengelolaan administrasi khususnya pengelolaan keuangan kendala yang dihadapi terutama adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan tersebut banyak sekali aturan-aturan yang harus dipegang dan dipenuhi dan seringkali aturan aturan tersebut mengalami perubahan. Diperlukan kesadaran yang tinggi dari pihak teknis dan administrasi untuk dapat bekerja beriringan sehingga setiap pencairan dana sudah disertai dengan kelengkapan administrasi yang di tetapkan. Hal ini memerlukan pengetahuan dan komunikasi dengan instansi terkait untuk mengetahui perkembangan peraturan yang diberlakukan.

Berbagai upaya dilakukan BPS Kota Bogor untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan dengan keadaan dan situasi daerah setempat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visinya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat

keberhasilan yang sangat nyata (*significant result*). Simpulan ini tercemin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 102,51persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa sudah mencapai target 100 persen sehingga dapat disimpulkan juga bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS.

Realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 90.72 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 100 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 85,34 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program DMPTL paling besar diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Kota Bogor secara keseluruhan adalah sebesar 88,73 persen dari total pagu.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

- TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah.
- Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ..... 1

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama tahun 2016.

### **1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS/Unit Kerja/Satker Daerah**

#### **1) Tugas Pokok**

BPS Kota Bogor mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Bogor menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di kab/kota.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS kab/kota.
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kab/kota.
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga kab/kota.

#### **3) Susunan Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, susunan organisasi Badan Pusat Statistik Kota Bogor terdiri dari:

- a) Kepala
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

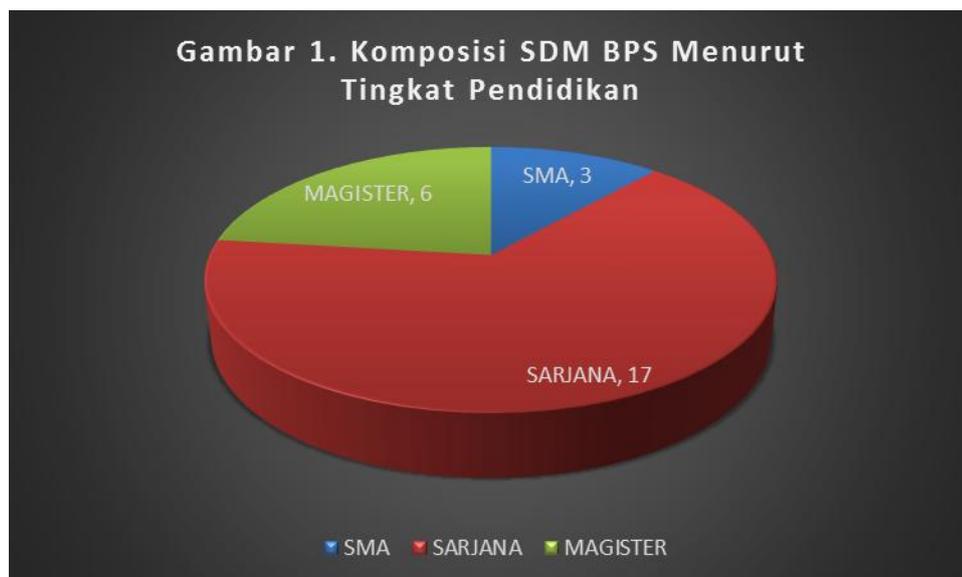
- c) Kepala Seksi Statistik Sosial
- d) Kepala Seksi Statistik Produksi
- e) Kepala Seksi Statistik Distribusi
- f) Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
- g) Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik

Secara rinci bagan organisasi Badan Pusat Statistik Kota Bogor terdapat pada **Lampiran 1**.

#### 1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kota Bogor Tahun 2017

Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kota Bogor yang ada saat ini terdiri dari 26 orang pegawai yang terdiri dari Kepala kantor, seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 5 orang Kepala seksi di bidang teknis, seorang bendahara pengeluaran daerah, 9 orang yang menduduki jabatan fungsional statistisi, 5 orang staf dan 5 orang Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, 4 orang pegawai berpendidikan SMA, 16, berpendidikan sarjana dan 6 orang berpendidikan master (pasca sarjana) . Di dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor, BPS Kota Bogor menugaskan 2 orang petugas keamanan dan seorang *cleaning service* yang diikat dalam perjanjian kontrak kerja selama satu tahun. Selain itu, hal yang tidak kalah penting yaitu mitra-mitra BPS Kota Bogor yang ikut berperan dalam mengsucceskan setiap kegiatan BPS.



## **1.5 Potensi dan Permasalahan**

Potensi dan Permasalahan BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar, untuk pemerintah dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional.

### **1.5.1 Potensi**

Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia. Uraian berikut menjabarkan potensi BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas pada periode renstra 2015 – 2019.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, baik pada tingkat nasional maupun regional.

Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sensus dan survei hingga ke daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistics Office/NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap data BPS masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna data (khususnya K/L) yang menggunakan data BPS sebagai acuan. BPS diharapkan mampu memanfaatkan potensi ini untuk dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pengguna data.

Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya NSO di negara lain, BPS selalu berpedoman kepada *Fundamental Principles of Official Statistics*, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (international cooperations) baik bilateral maupun multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan system official statistics di semua negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik sosial dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas oleh kantor statistik negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, BPS mengelola Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga statistik profesional, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik, yang berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya. Kedua unit tersebut merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM. Di samping itu, BPS juga merupakan instansi pembina bagi jabatan fungsional statistisi dan jabatan fungsional pranata komputer.

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Dengan penggunaan mobile applications ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi cloud computing juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu data warehouse.

*Sustainable Development Goals (SDG's)* menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat penting didalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, BPS dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas statistik yang diperlukan secara konsisten dan berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN).

### 1.5.2 Permasalahan

BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2015–2019, baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua dapat terus meningkat. Ketidakmampuan responden dalam memberikan informasi yang akurat menyebabkan kualitas data yang dihasilkan BPS belum optimal. Di samping itu, target sampel yang tidak terpenuhi terutama disebabkan keengganan masyarakat menjadi responden, menyebabkan response rate yang rendah, khususnya terjadi pada pelaku ekonomi.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian, lembaga, parlemen (DPR), dan dunia usaha berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan adhoc yang diselenggarakan. Meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat adhoc, yang seringkali berlangsung pada saat yang sama, tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas enumerator khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan menyebabkan belum dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang kerap terkendala adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi cakupan. Koordinasi yang relatif masih lemah, karena komunikasi antara unit kerja baik di BPS

Pusat maupun antara BPS Pusat dengan BPS Daerah belum terintegrasi secara baik, juga menjadi penyebab ketepatan waktu rilis yang belum optimal.

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara stand alone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data BPS. Kelemahan pada aspek SDM BPS terutama disebabkan karena belum optimalnya perencanaan kebutuhan SDM yang didasarkan pada pemetaan kompetensi, serta sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam rangka menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen SDM.

#### **1.6 Sistematika Penyajian Laporan**

Laporan kinerja ini disajikan dalam 4 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, yang terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kota Bogor
- 1.4. Sumber Daya Manusia BPS Kota Bogor
- 1.5. Potensi dan Permasalahan
- 1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Bab 2. Perencanaan kinerja, yang terdiri dari:

- 2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Bogor 2015-2019
- 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Bogor Tahun 2017

Bab 3. Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari:

- 3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2016
- 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2016 terhadap Tahun 2010-2014

3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019

3.4. Kegiatan Prioritas BPS Kota Bogor Tahun 2016

3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2016

Bab 4. Penutup

4.1. Tinjauan Umum

4.2. Permasalahan dan Kendala

4.3. Tindak Lanjut

<https://bogorkota.bps.go.id>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang



diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Badan Pusat Statistik Kota Bogor mengacu pada Renstra BPS 2015-2019 dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah. Badan Pusat Statistik Kota Bogor mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan dalam melaksanakan tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BPS nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Adapun kebijakan yang dijalankan Badan Pusat Statistik diarahkan untuk mendukung tugas pokok tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kota Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala kabupaten yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019.

##### 1) Visi Badan Pusat Statistik

Visi dari Badan Pusat Statistik yaitu "Pelopor data statistik terpercaya untuk semua"

##### 2) Misi Badan Pusat Statistik

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Pusat Statistik Kota Bogor yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;
- b) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui

- pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
- c) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.



**Gambar 2. Visi dan Misi BPS 2015-2019**

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.

... berkualitas ...

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter.

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”.

(UU no. 16 tahun 1997)".

... dan berstandar internasional...

"Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics".

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ...

"Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)".

... pembinaan dan koordinasi ...

"BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

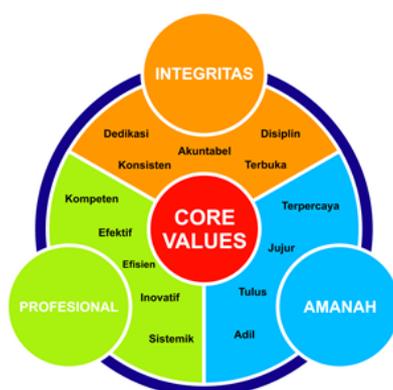
1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
2. Pengembangan statistik sebagai ilmu;
3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung

penyelenggaraan statistik;

4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
5. Pengembangan sistem informasi statistik;
6. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.  
Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
  - a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
  - b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik”.

Membangun insan statistik ...



**Gambar 3. Nilai Inti BPS**

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

... yang profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... berintegritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah.

### **3) Tujuan Badan Pusat Statistik Kota Bogor**

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, Badan Pusat Statistik Kota Bogor mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

#### 4) Sasaran Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BPS Kota Bogor mempunyai tiga tujuan yang dicanangkan dalam rencana strategis periode 2015 sampai dengan 2019. Tujuan BPS Kota Bogor selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis dan indikatornya yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “Peningkatan kualitas data statistik” adalah:
  - 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Dengan indikator sasaran:
    - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
    - 1.1.2. Persentase pengguna data yang selalu menjadikan data dan informasi statistik sebagai rujukan utama
    - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
    - 1.1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu
  - 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*). Dengan indikator sasaran:
    - 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
    - 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
    - 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” adalah “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”. Dengan indikator sasaran:
  - 2.1.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS
  - 2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
  - 2.1.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

- 2.1.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” adalah:
- 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS. Dengan indikator sasaran:
- 3.1.1. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
- 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata-I
- 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
- 3.2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

##### **5) Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik Kota Bogor**

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang statistik adalah meningkatkan kualitas statistik nasional yaitu data yang dihasilkan memenuhi berbagai kriteria, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/ coherence yang berarti konsisten antarsektor dan antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/interpretability.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015-2019.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada Renstra BPS Kota Bogor 2015-2019, maka BPS Kota Bogor menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan formasi statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas:
- Diseminasi hasil kegiatan Sensus Pertanian 2013 pada tahun 2015,
  - Survei Penduduk Antar Sensus 2015 untuk kurun waktu 2015-2016,

- Sensus Ekonomi 2016 untuk kurun waktu 2015-2018,
  - Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 untuk kurun waktu 2016-2018,
  - Sensus Penduduk 2010 untuk kurun waktu 2017-2019,
  - Pendataan Potensi Desa 2018.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,
- c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan response rate”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,
  - b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.
3. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat”, dengan strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik,
  - b. Meningkatkan customer relationship management,
  - c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
  - d. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai,
  - e. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik
  - f. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik
  - g. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.

4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:

Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI.

5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

#### **6) Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogor**

Untuk dapat menunjang penjelasan visi dan misi Badan Pusat Statistik Kota Bogor, maka untuk tahun anggaran 2017 dilaksanakan 3 (tiga) program, yaitu :

##### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga yang selama ini ditampung dalam anggaran rutin yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan sebagainya.

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS**

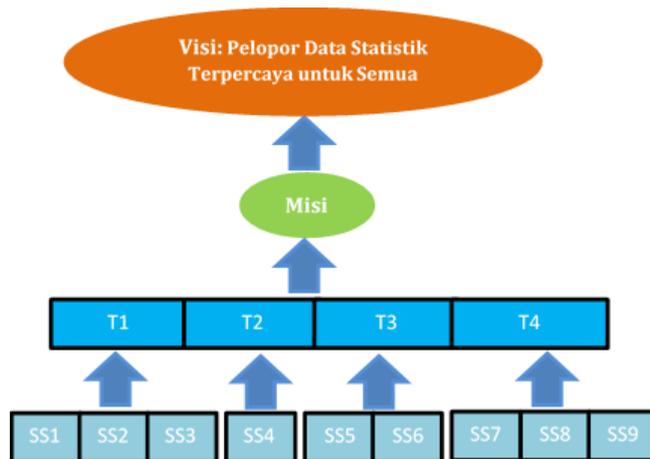
Program ini bertujuan untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kerja pegawai BPS Kota Bogor secara bertahap untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan operasional pengumpulan data. Sasaran program peningkatan sarana dan prasarana adalah tersedianya sarana dan prasarana

penunjang pelaksanaan tugas dan administrasi BPS Kota Bogor yang memadai dan terpelihara dengan baik. Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberikan kenyamanan sehingga akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memicu prestasi kerja dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta meningkatkan pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis teknologi informasi dan komputer;
- 2) Menyediakan data statistik dasar yang berkualitas di bidang kesejahteraan rakyat, ekonomi, dan bidang lain yang bersifat sektoral maupun lintas sektor seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan lainnya melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi;
- 3) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis dan manajemen statistik, serta komputasi data administrasi;
- 4) Mengembangkan sistem informasi statistik secara terus menerus sesuai dengan perkembangan nasional di bidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Mengembangkan metodologi penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan;
- 6) Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah; dan
- 7) Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah di bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional.



## 2.2. Perjanjian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2017

Pada awal tahun 2017 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kota Bogor yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kota Bogor. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2017 terhadap target.

### PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BOGOR TAHUN 2017

Tujuan/Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85
1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	70
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100
	Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	12
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	12
	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei - Persentase pemasukan dokumen	Persen	Persen

Tujuan/SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	( <i>response rate</i> )survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	80
	- Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> )survei dengan pendekatan usaha	Persen	80
	- Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha		
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	70
2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistic melalui website BPS	Pengunjung	35.000
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	70
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	80
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistic	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10
3.1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumberdaya manusia BPS	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
4.1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
4.2 Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	85
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kota Bogor adalah menyediakan data yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data

memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS Kota Bogor. Sehingga dalam membuat indikator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas. Ada beberapa dimensi data berkualitas yaitu:

**1) Relevansi**

Data dikatakan mempunyai relevansi jika memenuhi kebutuhan pengguna, untuk mengukur secara kuantitatif dilakukan dengan Survei Kepuasan Pengguna.

**2) Akurat**

Akurat adalah kedekatan antara nilai perkiraan dengan nilai populasi sebenarnya (yang tidak diketahui) indikator yang menunjukkan akurasi yaitu besarnya kesalahan sampling dan kesalahan non sampling.

**3) Ketepatan**

Sebagian besar pengguna ingin data terkini yang secara periodik disajikan dan tepat waktu sesuai jadwal. Ukuran ketepatan waktu yaitu perbedaan waktu antara tanggal tersedianya dengan tanggal yang seharusnya tersedia.

**4) Mudah diakses**

Data statistik sangat tinggi nilainya jika mudah diakses dalam bentuk yang diinginkan pengguna, dan dokumentasi yang cukup untuk memahami data tersebut. Indikator yang menunjukkan kemudahan akses data dapat diketahui dari banyaknya media yang digunakan dan jenis-jenis media untuk menyebarkan data.

**5) Keterbandingan**

Statistik karakteristik tertentu sangat bermanfaat jika nilainya dapat dibandingkan dengan karakteristik antar waktu dan antar tempat. Indikator untuk keterbandingan antar tempat yaitu jumlah dan persentase produk statistik yang menunjukkan perbedaan pengukuran unit untuk area yang berbeda. Indikator untuk keterbandingan antar waktu yaitu jumlah periode deret waktu dari data atau variabel.

## 6) Konsistensi

Data statistik dapat dikatakan konsisten apabila dapat digabung secara reliabel dengan cara berbeda untuk tujuan berbeda, tanpa harus melihat apakah berasal dari satu sumber. Indikator konsistensi meliputi konsistensi antara data provinsi dan data nasional, data bulanan dengan data tahunan.

## 7) Kelengkapan

Kelengkapan statistik adalah ketersediaan data dan informasi dengan statistik yang seharusnya tersedia menurut keperluan pengguna. Indikator kelengkapan yaitu persentase statistik yang tersedia dibandingkan dengan yang seharusnya tersedia.

Selain itu juga kelengkapan referensi terhadap dokumen penting yang seharusnya ada di tingkat nasional. Selain dimensi kualitas maka BPS Kota Bogor yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah daerah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu :

### a. Berikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja

Statistik-resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik-resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkum dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak warganegara mendapatkan informasi tentang masyarakat.

### a. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik.

**b. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna**

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan.

**c. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja**

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik resmi serta penyalahgunaan statistik.

**d. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai**

Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemutakhiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responden survei.

**e. Kerahasiaan Data Individu**

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan.

**f. Transparansi Tatacara Perstatistikan**

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan/penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan.

**g. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi**

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsistensi (ketaat-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.

**h. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara**

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi.

**i. Kerjasama Internasional**

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan-resmi di semua negara.

<https://bogorkota.bps.go.id>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000, BPS ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang Statistik Dasar baik pusat maupun daerah.

Akuntabilitas kinerja BPS Kota Bogor merupakan perwujudan kewajiban BPS daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bogor dilakukan sesuai dengan rencana strategik yang telah dipaparkan pada Bab II.

Secara umum kinerja BPS Kota Bogor menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 102,52 persen. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja yang menjadi prioritas, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang tercapai sesuai target dan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasinya kurang dari target. Indikator kinerja yang kurang dari target tersebut yaitu persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha, persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS dan persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, sudah menjadi komitmen seluruh pegawai BPS. Kepercayaan pemangku kepentingan terlihat terus meningkat, ditunjukkan dengan indikator banyaknya pengunjung yang datang langsung atau melalui website BPS. Kondisi ini juga menjadikan semakin meningkatnya tuntutan pengguna data BPS.

### 3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2017

#### Tujuan- 1

##### Peningkatan kualitas data statistik

Capaian Kinerja Tujuan Pertama Tujuan pertama adalah “peningkatan kualitas data statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan pertama dicapai dengan tiga sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, DAN (2) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*Respondent Engagement*). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 3. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Kualitas Data Statistik**

Tujuan/SasaranStrategis/indikator	Satuan	Target	Realisasai	Capaian Kinerja (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>T1. Peningkatan kualitas data statistik</b>				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85	94,89	111,64
<b>SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik</b>				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic	Persen	85	94,89	111,64
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	70	83,33	119,04
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	100,00	100
Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	12	12	100
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	1	1	100
<b>SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)</b>				
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survey dengan pendekatan rumah tangga	Persen	80	98,00	122,5
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	Persen	80	99,00	123,75
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	80	98	122,50
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaraan</b>				<b>112,34</b>

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 111.64 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 112.34 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai.

### Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*User Engagement*). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Prima Hasil Kegiatan Statistik**

Tujuan/SasaranStrategis/indikator	Satuan	Target	Realisasai	Capaian Kinerja (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</b>				
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	70	80,6	115,14
<b>SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)</b>				
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	35.000	34.525	98,64
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	70	77,5	110,71
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80	74,17	92,71
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaraan</b>				<b>104,30</b>

Berdasarkan tabel di atas, tujuan kedua juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 115,14 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 104,30 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga tercapai. Terdapat (dua) indikator sasaran strategis tujuan kesatu dan ketiga yang belum tercapai, yaitu “Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS” capaian kinerjanya sebesar 98,64 persen dan indikator “Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS” capaian kinerjanya sebesar 92,71

pesen. Meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun capaian kerjanya masuk dalam kategori sangat baik yaitu di atas 85 persen. Untuk meningkatkan capaian kinerja kedua sasaran strategis kedua tujuan tersebut diperlukan usaha memperbaiki web BPS Kota Bogor dengan data yang selalu *up to date* dengan tampilan yang menarik serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukungnya.

### Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah “penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik”, diukur dengan indikator Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN, dan (2) Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

**Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik”**

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10	8	80
SS5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	10	8	80
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaran</b>				<b>80</b>

Berdasarkan tabel di atas, tujuan ketiga belum tercapainya dengan tingkat capaian sebesar 80 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga belum tercapai. Diperlukan usaha yang lebih tinggi untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN agar capaian kinerja untuk tujuan ini dapat tercapai.

### Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, diukur dengan indikator opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel**

Tujuan/SasaranStrategis/indikator	Satuan	Target	Realisasai	Capaian Kinerja (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>T4. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel</b>				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60	60	100,00
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS				
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	38	42	110,53
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	60	65	108,97
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60	60	100,00
<b>Rata-rata Capaian Indikator Sasaraan</b>				<b>106,50</b>

Berdasarkan tabel di atas, tujuan keempat sudah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan keempat sebesar 106,50

### 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2015 - 2017

Perkembangan capaian kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2017 terhadap Realisasi Tahun 2015.**

Uraian	2015	2016	2017
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan	99,89	100,40	108,43
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis	99,44	102,51	106,73

Berdasarkan tabel di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan maupun

sasaran strategis menunjukkan kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2017 Hal ini mencerminkan bahwa BPS Kota Bogor terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya.

### 3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Bogor terhadap Target Renstra 2015 dan 2019.

Rencana Strategis BPS Kota Bogor adalah perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala kota yang berlaku selama kurun waktu 2015 -2019. Pada awal tahun 2015, BPS menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai pada periode tahun 2015-2019. IKU tersebut dituangkan ke dalam Renstra BPS Kota Bogor 2015-2019 dan melalui renstra tersebut ditetapkan besaran target dari tujuan/sasaran yang ingin dicapai pada periode tahun 2015-2019. Kemudian besaran target tujuan/sasaran pada tahun 2016 dicantumkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai komitmen pimpinan BPS di dalam mensukseskan kegiatan pada tahun anggaran 2016. Beberapa tingkat pencapaian kinerja dari indikator pada tahun 2016 bisa dikatakan melebihi dari target yang ditetapkan. Hasil tersebut sangat memudahkan BPS Kota Bogor untuk mencapai target-target pada tahun yang akan datang. BPS Kota Bogor akan lebih fokus pada indikator yang belum memenuhi target dan sebisa mungkin mempertahankan indikator-indikator yang sebelumnya telah memenuhi target. Tingkat pencapaian kinerja BPS Kota Bogor terhadap target Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8. Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2017 Terhadap Target Renstra 2015-2019**

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2015	Target PK 2017	Realisasi 2017	Capaian Kinerja (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>T1. Peningkatan kualitas data statistik</b>	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	84	85	94.89	111.64
<b>T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</b>	Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	70	70	80.6	115.14
<b>T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif</b>	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	10	10	8	80.00
<b>T4. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel</b>	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	60	60	100.00

### 3.4. Prestasi Tahun 2017

BPS Kota Bogor pada tahun 2017 belum memperoleh prestasi.

### 3.5. Kegiatan Prioritas BPS Kota Bogor Tahun 2017

Pada tahun 2017, ada dua kegiatan besar dan prioritas BPS yang membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Dua kegiatan tersebut yaitu:

#### a. Pendataan UMK dan UMB SE2016

Masyarakat luas dapat mengetahui urgensi ketersediaan data dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan keadaan terkini sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran pelaksanaannya.

Kegiatan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan pada tahun 2014, hingga kegiatan penyajian dan diseminasi hasil pada tahun 2018. Pada Tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan Listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 yang disingkat dengan Listing SE2016.

Sedangkan kegiatan lanjutan SE2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar Sensus Ekonomi tahun 2016 atau selanjutnya disebut dengan Pendataan UMK dan UMB SE2016.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016 diharapkan akan menghasilkan data rinci usaha/perusahaan Mikro Kecil dan Menengah Besar sebagai dasar untuk perumusan berbagai kebijakan dan analisis secara makro maupun mikro. Selain itu, hasil dari pendataan UMK dan UMB SE2016 ini juga digunakan sebagai benchmarking dan basis data bagi berbagai survei lanjutan di bidang ekonomi.

#### b. Survei Biaya Hidup

Dalam rangka peningkatan kualitas data Inflasi Nasional, Badan Pusat Statistik melaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) secara berkala. Data inflasi yang diperoleh digunakan sebagai alat penyesuaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak. Selain itu, data inflasi juga digunakan sebagai dasar penetapan target inflasi dalam penetapan kebijakan suku bunga dan sebagai deflator pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk membandingkan tingkat pengeluaran riil antar negara. Pengendalian terhadap tingkat inflasi pada akhirnya

akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rangkaian survei ini akan dilaksanakan dari Desember 2017 hingga Desember 2018.

Selain itu juga terdapat kegiatan diluar kegiatan diatas yang juga membutuhkan sumber daya tidak sedikit tetapi tidak sebanyak dua kegiatan di atas adalah :

c. Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2017

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2016 bertujuan menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semester maupun tahunan. Selain itu, diperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

d. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor dan Konsumsi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor dan Konsumsi bertujuan untuk mengumpulkan data kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kemiskinan, perjalanan & kriminalitas, dan perlindungan social dan mengumpulkan data konsumsi dan perjalanan, serta mengumpulkan data perlindungan sosial.

### 3.6. Upaya Efisiensi di BPS Kota Bogor

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kota Bogor selama tahun 2017 diantaranya adalah penghematan uang lembur dan PSPA.

### 3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Pagu yang diberikan ke BPS Kota Bogor untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2017 adalah sebesar 5.957.407.000 rupiah, terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9. Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2017**

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	3,670,542,000	3,329,996,688	90.72
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	32,000,000	32,000,000	100.00
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	2,254,865,000	1,924,247,600	85.34
<b>Total</b>	<b>5,957,407,000</b>	<b>5,286,244,288</b>	<b>88.73</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 90,72 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 100,00 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 85,34 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program PSPA paling besar diantara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Kota Bogor secara keseluruhan adalah sebesar 88,73 persen dari total pagu. Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Tinjauan Umum**

Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Kota Bogor pada tahun 2017, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS tahun 2017 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 108,43 dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 106,73. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan pelayanan prima.

BPS memiliki tugas dalam RPJMN 2015-2019, yaitu di bidang Pembangunan Sosial Budaya dan kehidupan Beragama dan program lintas Penguatan Data. Dalam konteks ini BPS Kota Bogor mendukung dan melaksanakan kegiatan prioritas Nasional BPS untuk mendukung RPJMN 2015-2019 tersebut adalah (1) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan (2) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat. Kedua kegiatan tersebut berhasil tercapai, dengan tingkat capaian kinerja masing-masing 100,00 persen.

BPS Kota Bogor meraih prestasi pada tahun 2017 dalam kualitas data Susenas. Dan terus berupaya berkontribusi bagi BPS dalam meraih prestasi lainnya.

Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, masalah yang ditemui dalam proses pencapaian target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah :

1. Dalam kegiatan pengumpulan data dengan sasaran responden perusahaan terkendala dengan tanggapan dari perusahaan yang kurang responsive yaitu keengganan untuk memberikan keterangan atau data yang sebenarnya. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu bahwa tidak seluruh perusahaan memiliki system administrasi yang memadai sehingga sulit untuk

memberikan data. Selain itu ada juga perusahaan yang tidak ingin data-data perusahaannya diketahui karena alasan bisnis atau kekhawatiran bahwa pendataan yang dilakukan ada kaitannya dengan perpajakan. Atau ada juga perusahaan yang merupakan cabang dari daerah lain sehingga pemberian data harus melalui izin dari kantor pusatnya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan kreatifitas dan keuletan dari petugas pencacah dan hal inilah yang selalu disampaikan oleh kepala seksi di BPS Kabupaten kepada petugas pencacah disamping memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ditemui di lapangan.

2. Dalam pengelolaan administrasi khususnya pengelolaan keuangan kendala yang dihadapi terutama adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan tersebut banyak sekali aturan-aturan yang harus dipegang dan dipenuhi dan seringkali aturan tersebut mengalami perubahan misalnya dalam masalah perpajakan. Hal ini memerlukan pengetahuan dan komunikasi dengan instansi terkait untuk mengetahui perkembangan peraturan yang diberlakukan.

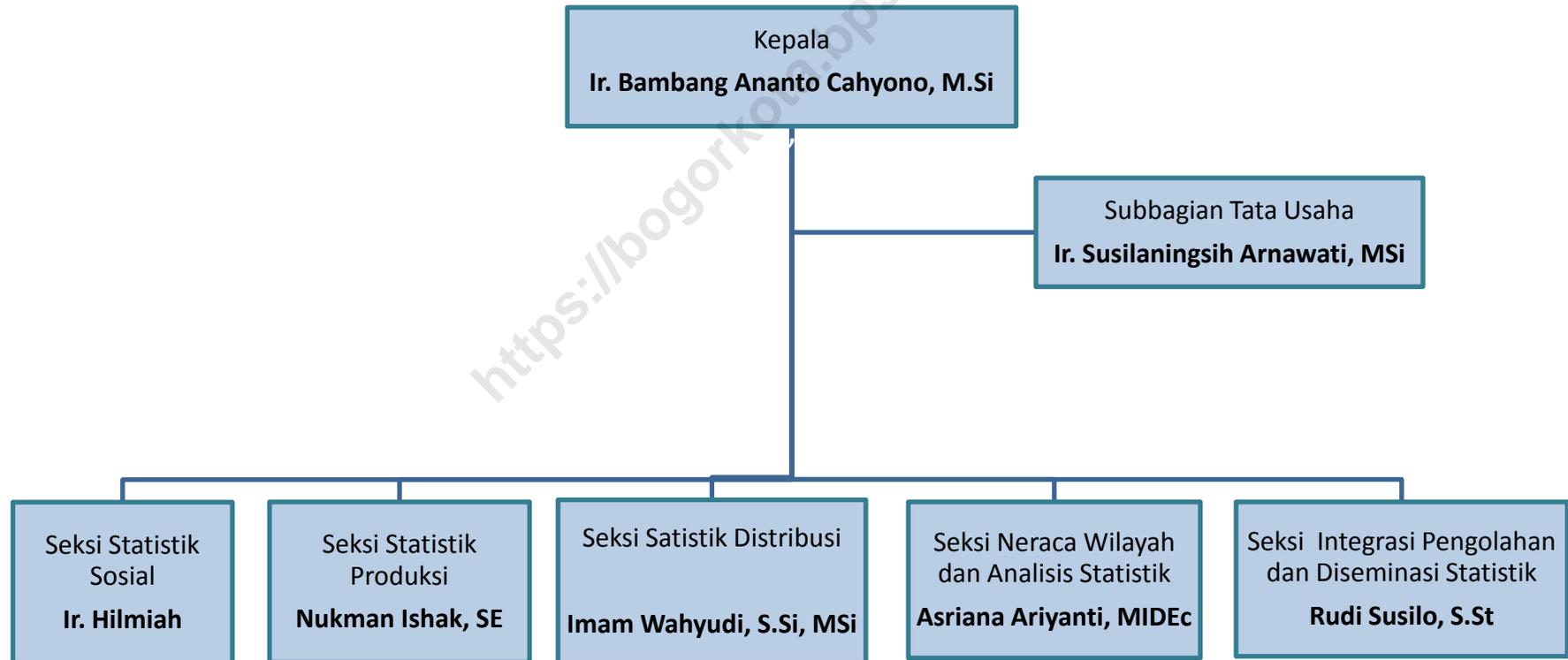
#### **4.2. Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:

- (1) Meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran strategis keempat sesuai amanat UU Statistik Nomor 16 tahun 1997, dengan melakukan upaya yang maksimal dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPS Kota Bogor.
- 2) Melakukan retargeting pada indikator “Persentase pemasukan dokumen (*respon rate*) survei dengan pendekatan usaha”, indikator “Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS” dan indikator “Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu” sesuai realisasi pada tahun 2017.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kota Bogor
- 4) Sosialisasi BPS terutama menyangkut tugas dan fungsinya, tentang kewajiban masyarakat untuk memberikan data kepada BPS serta manfaat dari data yang diberikan atau data yang dihasilkan BPS.

Lampiran 1

**STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA BOGOR**



## Lampiran 2. RENSTRA BPS 2015-2019

Program/Kegiatan	Sasarna Program (Outcome)/ Satuan Kegiatan (output)/Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik</b>						
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas	Persen	84	84	85	85	85
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	70	70	72	72	72
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	70	70	80	80	90
Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	25	25	25	25	25
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	43	43	43	43	43
<b>SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)</b>						
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> )	Persen	80	80	80	85	85
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	Persen	80	80	82	82	84
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	80	80	84	84	86
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	70	70	75.00	75	75
<b>SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)</b>						
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	200	200	210	225	240
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	70	70	75	75	75
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80	80	82	84	84
<b>SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS</b>						
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	40	40	35	35	35
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	70	70	70	70	70
<b>SS5. Meningkatnya pengawasan</b>						
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	67	67	70	70	70

Tujuan/SasaranStrategis/indikator	Satuan	Target
[1]	[2]	[3]
<b>T1. Peningkatan kualitas data statistik</b>		
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	84
<b>SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik</b>		
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic	Persen	84
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	70
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	70
Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	25
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	43
<b>SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)</b>		
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survey dengan pendekatan rumah tangga	Persen	80
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	Persen	80
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	80
<b>T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</b>		
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	70
<b>SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)</b>		
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	200
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	70
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana	Persen	80
<b>T3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel</b>		
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	67
<b>SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS</b>		
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	40
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	70
<b>SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>		
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	67

## Lampiran 4. Capaian Kinerja

Tujuan/SasaranStrategis/indikator	Satuan	Target	Realisasai	Capaian Kinerja (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>T1. Peningkatan kualitas data statistik</b>				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	84	85	101.19
<b>SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik</b>				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic	Persen	84	84	100
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	70	70	100.00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	70	100	142.86
Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	25	25	100
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	43	43	100
<b>SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)</b>				
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survey dengan pendekatan rumah tangga	Persen	80	80	100
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	Persen	80	70	87.5
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	80	90	112.5
<b>T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</b>				
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	70	70	100.00
<b>SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)</b>				
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	200	206	103.00
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	70	70	100.00
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80	78	97.50
<b>T3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel</b>				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	67	67	100.00
<b>SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS</b>				
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	40	35	87.50
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	70	73	104.29
<b>SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	67	67	100.00